



UPH
M E D A N

LAW PRO JUSTITIA

- KORUPSI DALAM DIMENSI KEKUASAAN
WAFDA VIVID IZZIYANA
- KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI
MEDIA PENYIARAN
RICKY BANKE
- PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
SRI SULISTYAWATI
- PEMBATASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MELALUI
UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
BUDIMAN N.P.D. SINAGA
- ANALISA HUKUM BERALIHNIA KEWENANGAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI
PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH
ALBERT LODEWYK SENTOSA SIAHAAN
- HAK ANAK ATAS IDENTITAS DAN KRITERIA ANAK SAH MENURUT
HUKUM
MAIDIN GULTOM

LAW PRO JUSTITIA	VOL. I	NO. 2	HLM. 1 - 100	MEDAN JUNI 2016	ISSN 2477-8176
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------

KORUPSI DALAM DIMENSI KEKUASAAN

Wafda Vivid Izziyana

Abstract

Every crime must have been a negativ impact, especially corruption. More macro again the impact of corruption, where corruption is getting revolutionarily. Changes in the pattern or style of corruption can lead to fragility of building a state of law, especially if the perpetrators come from the law enforcement officers, and discretionary nature of the decision makers, as well as the lack of accountability of power could lead to the proliferation of acts corruption,so corruption is always associated with the nature of monopoly, discretion, and accountability. The more centralized power, the stronger the chances of corruption at the center of power. Vice versa, if the center power is centralized or divided, such as regional autonomy, the corruption was followed parallel to the autonomy. This is due to power moved from one center of power to the many autonomous power centers, the virus of corruption followed him move from one center of power to many centers of power. Therefore, fighting corruption isnot just the application of Article, the legal reasoning of a decision, or the interpretation of dbate among legal experts, but should be on the point of the political oligarchy – business.

Keywords: *Corruption, power, political, and accountability.*

Abstrak

Setiap kejahatan tentunya berdampak negatif, apalagi korupsi, lebih makro lagi dampak korupsi itu, semakin refolutif. Perubahan pola atau gaya berkorupsi dapat mengakibatkan rapuhnya bangunan negara hukum, apa lagi jika pelakunya berasal dari para penguasa yang eksklusif, dan sifat diskresi pada pembuat keputusan, serta kurangnya akuntabilitas penyelenggaraan kekuasaan dapat mengakibatkan meningkatnya perbuatan korupsi.sehingga korupsi akan selalu terhubungkan dengan sifat monopoli, dikresi dan akuntabilitas. Begitu juga sebaliknya, bila kekuasaan terpusat atau terbag, seperti otonomi daerah, sehingga korupsi akan selalu mengikuti sesuai dengan otonomi tersebut. Permasalahan ini di karenakan kekuasaan berpinda dari satu pusat kekuasaan kebanyakan pusat kekuasaan yan otonom, jadi virus korupsipun akan selalu mengikuti yang mana berpindah dari satu pusat kekuasaan menalir ke banyak pusat kekuasaan maka dari pada itu, pemberantasan korupsi bukanlah sekedar penerapan pasal, legal reasoning sebuah putusan, ataupun perdebatan tafsir antara ahli hukum, tetapi harus pada titik oligarki politik – bisnis.

Kata kunci: *Korupsi, kekuasaan, politik, dan akuntabilitas.*